

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Sejak perang dingin berakhir, isu HI mengalami perubahan yang dipengaruhi pandangan masyarakat bahwa isu-isu selain peperangan dan kedamaian tidak boleh dikesampingkan. Isu-isu seperti hak asasi manusia, intervensi humaniter, *good governance*, lingkungan dan sebagainya memaksa aktor-aktor dalam HI untuk terlibat dalam penyelesaian dan penanganannya. Isu lingkungan pun menjadi isu yang begitu penting dan memiliki tingkat urgensi masalah yang tinggi dikarenakan isu ini dapat menimbulkan efek reaksi berantai yang jika terjadi bencana lingkungan di suatu wilayah kemudian akan menyebabkan bencana global. Bencana lingkungan menjadi fenomena perubahan transnasional yang melibatkan aktor-aktor secara global walaupun bencana tersebut terjadi di kawasan lain.

Berkaitan dengan itu, isu lingkungan pun diangkat menjadi isu hangat di setiap forum internasional dan menjadi agenda internasional. Hal ini dikarenakan dampak dari bencana lingkungan yang akan berimbas pada kacaunya tatanan ekonomi, politik global, sosial dan aspek lainnya, kemudian isu ini pun menjadi masalah vital yang dijadikan sebagai landasan negara-negara dan aktor internasional lainnya untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi persoalan ini. Adapun fokus masalah dalam isu lingkungan global yaitu pemanasan global, polusi, banjir, badai, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, juga pembuangan sampah yang berasal dari aktivitas manusia.

Pada dasarnya, sampah adalah materi atau objek yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang atau diharuskan dibuang yang berasal dari hasil aktivitas manusia ataupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi yang memerlukan penanganan juga biaya yang cukup besar dalam membuang atau membersihkannya. Namun, setiap tahunnya dunia harus khawatir dengan volume produksi sampah yang semakin meningkat ketika populasi global dan standar kehidupan pun semakin tinggi. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau buangan yang sebanding dengan tingkat konsumsi yang digunakan sehari-hari (Sejati, 2009, p. 12).

Dapat disimpulkan bahwa wilayah yang memiliki aktivitas padat dan populasi padat pun dipastikan akan memiliki persoalan sampah dengan produksi yang besar. Jakarta yang merupakan kota metropolitan dan ibukota negara Republik Indonesia yang memiliki luas 661,5 kilometer persegi harus menampung populasi sekitar 10,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 15,7 ribu orang tiap kilomernya sehingga menjadikan Jakarta kota terpadat di Indonesia dan Kota terpadat ke – 9 di dunia menurut *World Economic Forum* (WEF) yang dikutip dari CNBC Indonesia (2019). Jakarta pun menjadi pusat dari segala aktivitas perekonomian, pemerintahan dan vital lainnya sehingga banyaknya manusia yang berlalu lalang tiap harinya. Oleh karena itu, terhitung sejak tahun 2016 hingga sekarang, Jakarta harus menangani volume sampah sebesar 7.099 ton kubik per harinya dan menghasilkan 2,3 juta ton sampah per tahunnya (DetikNews, 2018).

**Gambar 1. Produksi dan Volume Sampah yang terangkut per hari di beberapa Ibu Kota Provinsi di Indonesia Tahun 2016**



Sumber: (Tirto.id, 2018)

Misalnya, sebanyak 90-220 ton sampah setiap harinya diangkat oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta dari setiap tempat seperti sungai, waduk, setu, danau, dan lain-lain. Produksi sampah ini pun menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan didominasi 54% oleh sampah organik dan 14%nya sampah plastik (Tirto.id, 2018). Menurut data yang masuk pada aplikasi Qlue, sebanyak 27.404 laporan tertulis mengenai sampah yang tidak terurus dengan baik selama periode Januari-Mei 2016. Menurut hasil penelitian *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) menunjukkan bahwa area Jakarta Selatan menyumbang sekitar 1,3 juta ton per tahun untuk kategori sampah plastik kemasan yang tidak terkelola dan berpotensi merusak ekosistem linzkgungan.

Sementara itu, Jakarta harus menghadapi polemik lebih sulit lagi dengan adanya perkiraan bahwa kota ini akan menjadi kota lautan sampah dikarenakan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang selama ini menjadi tempat pembuangan utama pengelolaan sampah di Jakarta dan bahkan TPA terbesar di dunia akan terancam *overload* pada tahun 2021. Secara administratif TPST Bantargebang memang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat namun status tanah dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan sejak September 2016 beralih dikelola oleh Dinas Kebersihan Pemprov DKI. TPST yang telah beroperasi sejak tahun 1986 ini memiliki lahan seluas 110 hektare sudah penuh dengan sampah dengan status sekitar 82% atau sekitar 90.2 ha telah terpakai untuk menumpuk sampah yang mencapai tinggi 30-40 meter dan sisanya sekitar 18 % merupakan sarana untuk jalan ke kantor, instalasi pengolahan Lindi dan jalan masuk. Dengan fakta tersebut, jika produksi sampah masih terus meningkat dengan diiringi penanganan yang buruk maka Jakarta sudah dipastikan akan mengalami bencana akibat sampah.

Sehubungan dengan itu, persoalan penanganan sampah yang buruk menurut Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, dikarenakan sampah tidak terpilah di sumbernya dan tercampur dengan sampah yang membusuk, sehingga sampah yang semula mempunyai nilai ekonomis, menjadi tidak ada nilai jualnya saat akan diolah. Perilaku masyarakat pun juga menjadi peran utama dalam penumpukan sampah karena dianggap tidak mampu untuk memilah sampah. Di sisi lain, menurut Mulyadin dkk (2018, p. 180), dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan kondisi sosial ekonomi budaya yang kurang dalam kesadaran pengelolaan sampah, rendahnya keseriusan dalam upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, serta ketidaksesuaian konsep pengelolaan sampah yang diterapkan di Jakarta. Padahal, Jakarta tengah dalam kondisi darurat dalam kegiatan mengelola sampah yang tiap harinya didesak untuk perlu ditindak cepat dan tepat.

Walaupun demikian, penanganan sampah pun sudah dilakukan berbagai macam cara oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, kebanyakan cara mengandung berbagai konsekuensi yang mempengaruhi jangka panjang. Sebut saja, dalam proyek pengelolaan sampah, Jakarta akan menggunakan teknologi *Intermediate Treatment Facility* (ITF)

yang diperkirakan mampu mengurangi produksi sampah sekitar 7.824 ton/hari. Teknologi ini baru saja dibangun di wilayah Sunter, Jakarta Utara dan direncanakan akan dibangun di Marunda, Cakung dan Duri Kosambi. Dikutip dari Tirto.id dalam artikelnya yang berjudul Pembangunan ITF & Usaha Jakarta Lepas Dari Bantar Gebang (2018), sampah yang tidak dapat dikelola di TPST Bantar Gebang diklaim dapat terminimalisir sebanyak 2.200 ton per harinya apabila menggunakan teknologi ITF.

Namun, menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, ITF akan dinilai percuma apabila sampah masih terus bertambah. Kekuatan pengelolaan sampah bukan pada segi teknologi ITF melainkan kekuatan yang mampu mengurangi produksi sampah sampai pada akhirnya. Bahkan, teknologi ITF memiliki konsekuensi besar dikarenakan menggunakan teknologi *incinerator* yang merupakan teknologi pembakaran sampah. Menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafruddin, teknologi yang menggunakan *incinerator* tidak akan jauh berbeda dengan PLTU yang memperburuk kualitas udara. Hal ini juga didukung pernyataan dari *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL) dikutip dari DetikNews (2020) yang menyatakan bahwa ITF sangat berpotensi menimbulkan zat berbahaya seperti yang terjadi di Eropa. Data pemantauan emisi *incinerator* di Eropa menjadi sumber utama dari emisi partikel halus yang kemungkinan besar makin memperburuk kondisi udara di Jakarta. Untuk itu, Jakarta membutuhkan cara lain dan teknologi lain yang mampu meminimalisir kemungkinan atas konsekuensi jangka panjang yang dapat dihasilkan dari ITF maupun cara manual lainnya.

Jika melihat pengelolaan sampah di daerah lain khususnya kota-kota besar lain seperti Surabaya, Jambi, dan Malang yang mengelola sampah hingga pada akhirnya dan mengubah sampah-sampah tersebut menjadi sumber listrik / bahan lain yang dapat diperuntukkan kehidupan sehari-hari, sudah seharusnya Jakarta dapat mengikuti tindakan ini. Hal ini tentu saja bisa menjadi cara lebih baik dan menguntungkan apalagi jika Jakarta mampu menghemat biaya pengelolaan sampah yang dilaporkan sebanyak Rp 3,7 Triliun yang bahkan biaya ini dikhususkan hanya untuk pembangunan ITF belum termasuk dengan biaya pengelolaannya. Berdasarkan Katadata (2019), dibandingkan dengan kota lain seperti Surabaya yang dinobatkan sebagai kota dengan produksi sampah tertinggi di

Indonesia pada tahun 2016 pun menunjukkan penurunan produksi dari 9.710,61 ton per hari menjadi Rp 474,02 Miliar untuk 2.600 ton per hari pada tahun 2019, Malang membutuhkan Rp 90 Miliar dengan produksi sampah sebanyak 500 ton tiap harinya.

Oleh karena itu, Jakarta dapat mempelajari dan bertukar informasi dengan kota lain baik di Indonesia maupun negara lain yang berhasil menekan produksi sampah di kotanya. Jakarta pun dapat bekerjasama dengan organisasi internasional yang memiliki program penanganan sampah yang telah bekerjasama dengan pemerintahan pusat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Luar Negeri RI No.3 Tahun (2019) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama internasional dengan daerah di dalam negeri, di luar negeri, dan lembaga di luar negeri yang telah memiliki dasar penerusan kerjasama dengan Pemerintahan Pusat.

Dalam hal ini, telah banyak organisasi internasional yang bekerjasama dengan Pemerintahan Pusat yang dikoridori oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Dalam Negeri RI dalam bentuk komitmen, Letter of Intents (LoI) maupun Memorandum of Understanding (MoU) yang memungkinkan agar meneruskan kerjasama dengan Pemprov DKI yang tentunya juga dapat membantu menangani persoalan sampah. Salah satu organisasi tersebut merupakan organisasi internasional antar pemerintah kota yaitu *United Cities Local Government Asia-Pacific* (UCLG ASPAC). UCLG ASPAC dan Kementerian Dalam Negeri telah bekerjasama sejak 2010 hingga sekarang dengan memperpanjang MoU pada 5 Juni 2017 agar dapat menjalin kerjasama yang harmonis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pada dasarnya, UCLG dapat dianggap sebagai versi lain dari PBB dikarenakan keanggotaannya yang bersifat global dan fokus agenda mereka bersifat umum. UCLG ASPAC merupakan organisasi kepanjangan tangan dari UCLG yang berpusat di Jakarta, Indonesia yang berfokus pada perwujudan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan mewadahi kota-kota di seluruh negara yang ada di wilayah Asia Pasifik. Awalnya, UCLG ASPAC dibentuk dengan nama *International Union of Local Authorities* (IULA ASPAC) pada September 1989 disaat Kongres IULA ke-29 di Perth, Australia. UCLG ASPAC merupakan organisasi gabungan dari IULA – ASPAC, *United*

*Towns Organization (UTO)* dan *World Association of the Major Metropolises (METROPOLIS)* dan dibentuk sebagai entitas baru di Taipei pada 14 April 2004. Lebih dari 7.000 pemerintah daerah menjalin hubungan dengan UCLG ASPAC untuk mewakili wilayah Asia Pasifik.

Kemudian, UCLG ASPAC pun memiliki sekretariat dan struktur yang jelas yang dipimpin langsung dari perwakilan pemerintahan yang mewakili daerah seperti Gubernur/Walikota. Dalam hal tersebut, saat ini UCLG (Pusat) dipimpin oleh Walikota Al-Hoceima dari Maroko yaitu Mohamed Boudra dan UCLG ASPAC dipimpin oleh Walikota Surabaya dari Indonesia yaitu Tri Rismaharini. UCLG ASPAC memiliki program-program yang diluncurkan oleh mereka sendiri, mereka juga menjadi lembaga yang melaksanakan program yang diusung oleh pihak lain yang telah bekerjasama dengan mereka. Oleh karena itu, UCLG ASPAC merupakan arena yang tepat bagi kota-kota yang hendak memenuhi potensi daerah dikarenakan mereka menggandeng kota baik dalam maupun luar negeri, akademisi/ahli, swasta, organisasi internasional lain sehingga dapat memenuhi kepentingan kota-kota yang tergabung menjadi keanggotaan.

Sebagai contoh, UCLG ASPAC pun memiliki program *Zero Waste* yang mempromosikan strategi pengelolaan limbah padat ke pemerintah daerah pada tahun 2014. Pada awal pengembangan program tepatnya Agustus 2014, UCLG ASPAC langsung bekerjasama dengan Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan proyek *Low Carbon Society* yang bertujuan untuk mempromosikan pemanfaatan limbah agar menjadi energy dan bahan bakar bagi transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Proyek ini pun mendatangkan tim dari UCLG ASPAC dan *partner* dari *Global Cooperation Institute for Sustainable Cities (GCI)* of Yokohama City University, Jepang yang mendatangi langsung Wakatobi selama 4 hari, agar dapat memastikan peralatan yang tepat untuk pulau Wakatobi dalam penerapan proyek tersebut (UCLG ASPAC, 2014).

Di sisi lain, UCLG ASPAC pun bekerjasama dengan UN-ESCAP dan *Waste Concern Bangladesh* dalam menerapkan proyek hibah *Waste to Energy (WTE)* pada November 2014. Proyek yang bertujuan untuk mengurangi dan mengubah sampah menjadi energi baru di kota *secondary* dan kota-kota kecil dengan menggunakan fasilitas

pengolahan limbah minim biaya yaitu *Integrated Resource Recovery Centers* (IRRC) yang dapat mengubah sampah menjadi kompos dan tenaga listrik. Proyek ini memilih kota di Indonesia seperti Jambi dan Kabupaten Malang untuk menjadi kota percontohan dalam pelaksanaan proyek ini dan menerima hasil dari program ini. Proses *ground breaking* pun dilakukan September 2017 dengan pendanaan sebesar Rp 1,7 Miliar untuk membangun teknologi IRRC di Pasar Baru Talang Banjar, Jambi dan Pasar Mantung, Malang.

Di samping itu, UCLG ASPAC bertindak sebagai badan pelaksana program pun menyelenggarakan *workshop, training*, dan juga menjadi penyedia konsultan ahli serta *partner* yang dapat menyediakan peralatan yang tepat untuk penerapan program di kota-kota yang akan diterapkan program *Zero Waste*. Dengan program ini pula, UCLG ASPAC melakukan asistensi secara langsung ke setiap anggota untuk dapat mengimplementasikan daur ulang dengan *capacity building* dengan tujuan untuk meminimalisir sampah dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah dapat diolah menjadi sumber pendapatan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa UCLG ASPAC pun seharusnya dapat berperan penting untuk menerapkan program-program yang bisa membantu Jakarta agar terbebas dari persoalan sampah. Ditambah pula, Jakarta merupakan anggota dari UCLG ASPAC yang merangkap menjadi co-host dan penyedia fasilitas bagi UCLG ASPAC serta pernah menjadi Presiden UCLG ASPAC pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo sehingga diyakini dapat mendukung hubungan kerjasama tersebut. UCLG ASPAC seharusnya dapat menjadi organisasi internasional yang tepat apabila Pemprov DKI hendak bekerjasama dengan saling bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Jakarta. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut baik ke kedua belah pihak, tidak dapat ditemukan komitmen atau penerusan kerjasama antara Pemprov DKI dengan UCLG ASPAC terkait penanganan sampah.

Berdasarkan paparan di atas, ditambah dengan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai kerjasama antara UCLG ASPAC dengan Pemprov DKI Jakarta dalam Penanganan Sampah, maka penulis mengambil judul penelitian berikut:

## ***Peran UCLG ASPAC dalam Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 – 2019: Peluang & Tantangan.***

### **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

Bagaimana Peran UCLG ASPAC dalam Penanganan Sampah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2019?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran dari UCLG ASPAC sebagai Organisasi Internasional untuk Pemerintah Lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di kota khususnya Jakarta yang fokus pada permasalahan penanganan sampah pada tahun 2016-2019.
- b. Untuk menganalisa dan mengidentifikasi faktor yang dapat menjadi peluang dan tantangan kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan UCLG ASPAC pada tahun 2016-2019.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berfungsi untuk mengkaji peran yang dimiliki oleh IGO seperti UCLG ASPAC yang dapat menjadi alat, arena, dan aktor independen bagi pemerintah daerah dalam membangun dan memaksimalkan potensi yang ada serta membantu penyelesaian tantangan dan hambatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk civitas akademika dalam hubungan kerjasama UCLG ASPAC dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya melakukan hubungan luar negeri dengan pihak luar negeri yang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan kepentingan daerah.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjabarkan hal-hal seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi peran UCLG ASPAC dalam Penanganan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2016-2019

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa peran UCLG ASPAC dalam penanganan sampah di DKI Jakarta pada tahun 2016-2019

## **BAB IV PELUANG & TANTANGAN PENANGANAN SAMPAH DI JAKARTA PADA TAHUN 2016-2019**

Dalam bab ini penulis akan membahas eksplanatori secara detail yaitu kondisi sampah di Jakarta pada tahun 2016 – 2019 serta faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan persoalan sampah di Jakarta dengan menganalisa persoalan perilaku yang menyangkut budaya, keterbatasan wilayah TPA, persoalan elemen regulative, normative dan budaya kognitif di Jakarta, serta korelasi komprehensif dari inter-governmental sekitaran Jabodetabek.

## **BAB V PERAN UCLG ASPAC DALAM PENANGANAN SAMPAH DI JAKARTA TAHUN 2016-2019**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah kerjasama UCLG ASPAC dengan Provinsi DKI Jakarta, Program Penanganan Sampah yang diusung oleh UCLG ASPAC serta menganalisa peran UCLG ASPAC dalam penanganan sampah di Jakarta pada tahun 2016 – 2019 serta dampak yang diberikan oleh UCLG ASPAC untuk DKI Jakarta melalui hubungan kerjasama tersebut dengan konteks teori peran *international governmental organization* (IGO)

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran penelitian secara umum mengenai penelitian yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya.